

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU MADRASAH

DOI: <https://doi.org/10.47281/fas.v4i1.134>

Muaripin^{1*}, Firman Nugraha², Yudha Andana Prawira³
^{1,2,3}Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Indonesia
*Email: muaripinn69@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to analyze the implementation of the Education Quality Assurance System (SPMP) based on Integrated Quality Management at MTs Negeri West Bandung Regency in terms of program planning, program implementation, program monitoring and evaluation, obstacles and efforts to overcome obstacles in implementing SPMP and the success rate of SPMP in improving quality of education. This study uses a qualitative approach with analytical descriptive method. The object of the research is the head of the madrasa, madrasa teacher, TU, committee chairman, supervisor, and students. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, documentation and literature study. The analysis and interpretation technique are carried out by data reduction, data display, triangulation, conclusion drawing and data verification. The results showed that the optimal implementation of SPMP based on Integrated Quality Management in MTs Negeri West Bandung Regency was able to improve the quality of madrasas. This can be seen from the activities of planning programs, implementing programs, carrying out monitoring and evaluation, efforts to overcome obstacles in the implementation of SPMP and the success rate of SPMP in improving the quality of madrasas, so that madrasas are able to achieve SNP and are able to develop sustainable quality madrasas.

Keywords: *Quality Management; Madrasah Quality; Quality Assurance System*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi SPMP berbasis Manajemen Mutu Terpadu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat dalam hal perencanaan program, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi program, kendala dan upaya mengatasi kendala dalam implementasi SPMP dan tingkat keberhasilan SPMP dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Objek penelitiannya adalah kepala madrasah, guru madrasah, TU, ketua komite, pengawas, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis dan penafsiran dilakukan dengan reduksi data, display data, triangulasi, pengambilan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan implementasi SPMP berbasis Manajemen Mutu Terpadu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat yang optimal mampu meningkatkan mutu madrasah. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan merencanakan program, melaksanakan program, melaksanakan pengawasan dan evaluasi, upaya mengatasi kendala dalam implementasi SPMP dan tingkat keberhasilan SPMP dalam meningkatkan mutu madrasah, sehingga madrasah mampu mencapai SNP dan mampu mengembangkan mutu madrasah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Manajemen Mutu; Mutu Madrasah; Sistem Penjaminan Mutu

PENDAHULUAN

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat UUSPN Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa : *“Pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau pelatihan bagi perannya di masa yang akan datang yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”*.¹

Proses pendidikan secara operasional dalam pendidikan formal proses pembelajaran berlangsung pada satuan pendidikan tertentu dan harus mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar Nasional

Pendidikan dinaungi regulasi berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang terdiri dari delapan standar, yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Madrasah Tsanawiyah sebagai lembaga pendidikan formal disebutkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

Pelaksanaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah diharapkan sesuai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Apabila proses pendidikan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka pendidikan tersebut menjadi pendidikan bermutu. Sukmadinata memberikan gambaran, bahwa permasalahan mutu pendidikan disebabkan oleh : (1) mutu lulusan, (2) mutu pengajaran, (3) bimbingan dan latihan dari guru, (4) mutu profesionalisme dan kinerja guru, (5) mutu manajerial pimpinan pendidikan, (6) keterbatasan sarana prasarana pendidikan, (7) kurangnya fasilitas pendidikan, (8) keterbatasan media dan sumber belajar, (9) Keterbatasan alat dan bahan latihan, (10) iklim sekolah, (11) lingkungan pendidikan, (12) dukungan dari pihak terkait dengan pendidikan. Yang pada akhirnya semuanya berujung pada mutu lulusan apakah mutunya tinggi atau rendah tergantung pada permasalahan mutu pendidikan di atas.²

Untuk mencapai madrasah yang bermutu sebagaimana di atas banyak tantangan yang dihadapinya, salah satunya adalah globalisasi. Tantangan globalisasi sangat besar pengaruhnya dalam berbagai bidang kehidupan tak terkecuali bidang pendidikan. Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sedangkan pada ayat 3 peraturan tersebut dijelaskan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan.

Kesadaran pentingnya mutu pendidikan bagi masyarakat Indonesia semakin dirasakan dan diperlukan. Hal ini dalam rangka menjawab permasalahan rendahnya mutu pendidikan nasional yang perlu segera diperbaiki. Berdasarkan laporan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berkedudukan di Hongkong,³ Sistem Pendidikan Indonesia terburuk di Asia. Mutunya masih di bawah Negara Vietnam, dan Negara-negara tetangga di Asia. Pendidikan nasional di Indonesia hanya mendapat tingkat 12 di bawah Vietnam, sedangkan rangking pertama adalah Korea Selatan. Sejalan juga dengan pendapatnya Prawira, dkk, bahwa perlunya meningkatkan mutu pendidikan nasional.⁴

Melihat fakta di atas, mutu pendidikan menjadi sesuatu yang penting untuk diusahakan terpenuhi. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh berbagai hal, secara makro dipengaruhi oleh faktor Kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi dan komunikasi dalam pendidikan serta sumber daya manusia.⁵ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mutu pendidikan merupakan hal sangat tergantung kepada tiap-tiap unsur dari komponen-komponen tersebut.

Penjaminan mutu (*quality assurance*) adalah seluruh rencana dan tindakan yang sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari mutu. Sesuai dan sejalan dengan pendapat Helmansyah, dkk.⁶ Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pada level pendidikan tingkat dasar dan menengah terkait dengan pengkajian mutu pendidikan, analisis dan pelaporan mutu pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan penumbuhan budaya mutu berkelanjutan.

Penjaminan mutu pendidikan pada jenjang madrasah sedang berusaha untuk mencapai standar yang diharapkan. Hal ini karena madrasah dianggap masih ketinggalan, terutama sumber daya pendidik dan tenaga kependidikannya yang belum profesional karena masih banyak tenaga pendidik yang *mismatch* yang perlu

distandarkan. Demikian juga tidak bisa dipungkiri jumlah madrasah didominasi oleh madrasah swasta hampir 90% yang dikelola oleh yayasan pendidikan baik pribadi atau kelompok organisasi dengan biaya mandiri dan swadaya walaupun ada bantuan pemerintah melalui BOS dan BOSDA juga ada, sehingga madrasah dianggap belum berkualitas.⁷

Selanjutnya pada tahap implementasi dari pencapaian SNP Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, pertama mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPMP sekaligus dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM. Penjaminan mutu pendidikan di MTs diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang siap dan mampu berkompetisi dengan situasi lokal maupun global yaitu melalui pendidikan di dalamnya. Sebab pendidikan mempunyai peran yang sangat penting sebagai agen dalam perubahan sosial (*agent of social change*). Melalui pendidikan akan diperoleh konservasi nilai-nilai dan kultur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan peran dan sifatnya yang kompleks dan unik tersebut, MTs sebagai suatu organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi.

Keberhasilan MTs merupakan pula penjelmaan keberhasilan pimpinan satuan pendidikan sekaligus sebagai manajer. Kepala MTs yang berhasil adalah apabila ia mampu memahami keberadaan MTs sebagai organisasi yang kompleks dan unik serta mampu melaksanakan peranan kepala sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpinnya. Sehingga kepala memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kemajuan dan keberhasilan MTs.

Dalam tataran pelaksanaan pendidikan di madrasah sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, sebagai kabupaten yang masyarakatnya sejak lama memiliki nuansa religius sangat bagus, dibuktikan dengan banyaknya pondok-pondok pesantren, majlis ta'lim, dan MTs-MTs yang hampir ada di setiap kecamatan. Khusus untuk MTs kebanyakan swasta yang dikelola oleh yayasan milik pribadi atau milik lembaga organisasi kemasyarakatan. MTs yang Negeri di Kabupaten Bandung Barat hanya ada lima MTs Negeri, yaitu: MTs Negeri 1 Bandung Barat, MTs Negeri 2 Bandung Barat, MTs Negeri 3 Bandung Barat, MTs Negeri 4 Bandung Barat dan MTs Negeri 5 Bandung Barat.

Memperhatikan perkembangan MTs di Kabupaten Bandung Barat sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berlangsung di mesjid, surau maupun pesantren sebagai lembaga pendidikan informal. Karena itu madrasah boleh dikatakan sebagai perkembangan lebih lanjut sekaligus merupakan awal kebangkitan lembaga pendidikan Islam secara formal.⁸ Begitu pula dengan lembaga pendidikan Islam, pesantren, baik karena pesantren merupakan cikal bakal berdirinya madrasah itu sendiri ataupun karena pesantren juga menyelenggarakan pendidikan dan madrasah di dalamnya,⁹ atau juga karena misi yang sama sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada belajar keagamaan.

MTs sebagai lembaga pendidikan khususnya di Kabupaten Bandung Barat juga mengalami pasang surut dalam perkembangan misinya dalam membangun kebudayaan dan peradaban masa depan.¹⁰ Satu sisi ada MTs yang maju dan makin berkembang dan pada sisi yang lain juga MTs yang mengalami kemunduran karena tak mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan perubahan. Kelebihan dari madrasah sejak awal telah dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang mencetak moral,¹¹ di lingkungan Kantor Kementerian Agama khususnya Kabupaten Bandung Barat.

Walaupun keberadaan MTs tersebut hampir semua dianggap masih berada di bawah sekolah umum khususnya yang negeri. Salah satu indikasinya peserta didik yang masuk madrasah adalah mereka yang tidak lulus masuk ke sekolah umum kebanyakan memilih ke MTs Negeri sebagai pilihan keduanya dan sisanya ke sekolah lain. Namun demikian ada pula MTs Negeri menjadi pilihan pertama oleh anak-anak dan orang tua khususnya bagi mereka yang ingin anaknya lebih memahami tentang keagamaan yang lebih baik. Karena itu, madrasah perlu mengembangkan visi dan misi dalam rangka agar memiliki citra madrasah lebih baik.

Pengembangan visi dan misi diawali dengan mengimplementasikan SPMP sebagai sebuah panduan dalam meningkatkan mutu madrasah. Madrasah di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan permendiknas nomor 63 tahun 2009 seyogianya melakukan evaluasi Diri Madrasah yang selanjutnya disingkat EDM atau berdasarkan Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui empat tingkatan acuan standar mutu, yaitu: tingkat pertama di bawah SPM, tingkat kedua SPM, tingkat ketiga SNP, dan tingkat keempat di atas SNP. Standar mutu di atas SNP berlaku bagi satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP. Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal dan Standar mutu di atas SNP yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional tertentu.

Implementasi SPMP di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat mulai dilaksanakan tahun 2012 yang diawali dengan sosialisasi SPMP oleh Bidang Mapenda Kanwil Propinsi Jawa Barat dan Seksi Mapenda Kanmenag Kabupaten Bandung Barat dalam kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Madrasah (MK2-MTs) maupun di wilayah Kelompok Kerja Madrasah (KKM). Demikian juga Balai Diklat Keagamaan Bandung melalui diklat peningkatan kompetensi pengawas dan kepala madrasah yang di dalamnya mencakup materi SPMP yang ditindaklanjuti oleh para pengawas dengan melakukan monitoring ke madrasah-madrasah binaannya masing-masing dengan baik. Oleh karena itu menurut peneliti, bahwa dengan implementasi SPMP Berbasis Manajemen Mutu Terpadu yang optimal, maka selayaknya peningkatan mutu pendidikan di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat menjadi lebih baik.

Berdasarkan pengamatan awal implementasi SPMP yang dilakukan di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat kenyataan menunjukkan kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan SPMP di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat belum dilaksanakan secara optimal.
- b. Seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mendukung terlaksannya SPMP di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat belum optimal.
- c. Rekomendasi yang dihasilkan dari EDM yang mencakup delapan SNP dalam SPMP belum sepenuhnya diprogramkan dalam RKM dan belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- d. Keterlibatan komite madrasah dan orang tua peserta didik belum maksimal.

Berkenaan dengan latar belakang tersebut, secara umum rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peningkatan mutu madrasah melalui implementasi SPMP Berbasis Manajemen Mutu Terpadu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu, pendekatan kualitatif.¹² Untuk mendapatkan data yang objektif dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tertentu melalui observasi, wawancara langsung, dan dokumen yang ada yang dihimpun dalam catatan-catatan penulis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala madrasah, wakil kepala bidang Kurikulum, wakil kepala bidang sarana, wakil kepala bidang kesiswaan, guru-guru mata pelajaran, tenaga kependidikan, dan komite di MTsN Kabupaten Bandung Barat sebagai key informan yang dapat memberikan keterangan yang benar tentang proses pelaksanaan SPMP melalui teknik observasi dan wawancara langsung, sebagaimana dikemukakan Kurnia dan Sugiono.¹³

Penelitian ini dilakukan pada tiga MTs Negeri saja yang diteliti yaitu: MTs Negeri 1 Bandung Barat, MTs Negeri 2 Bandung Barat dan MTs Negeri 5 Bandung Barat. Dengan asumsi bahwa MTs Negeri 1 Bandung Barat merupakan MTs Negeri yang pertama berdiri di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian MTs Negeri 2 Bandung Barat merupakan MTs Negeri yang dianggap paling maju dibanding dengan empat MTs Negeri

lainya di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan MTs Negeri 5 Bandung Barat merupakan MTs Negeri yang paling terakhir berdiri di Kabupaten Bandung Barat.

Sedangkan data sekunder sebagaimana pula dikemukakan Prawira, dkk¹⁴ (data pendukung dan pelengkap) digali dari buku-buku, internet, surat kabar, tape recorder, CD, literatur, dokumen atau catatan dan lain-lain yang terdapat pada arsip tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan erat kaitannya dengan masalah yang sedang kita teliti. Selanjutnya peneliti menganalisis data yang terkumpul kemudian dicari persamaan dan perbedaan dalam pemberian informasi oleh beberapa subjek tersebut diatas. Ketika dirasakan cukup dalam perolehan data-data diatas informasi yang diperlukan barulah peneliti dapat menyimpulkan apa yang menjadi kajian peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Program SPMP Berbasis Manajemen Mutu Terpadu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat

Perencanaan program merupakan yang paling strategis yang menentukan apakah madrasah akan menjadi madrasah bermutu atau tidak. Sebagaimana pendapat Mulyasa mengungkapkan tentang perencanaan dalam perspektif program pendidikan sedikitnya memiliki dua fungsi utama, yaitu: 1) sebagai upaya sistematis untuk menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia atau dapat disediakan. 2) sebagai kegiatan untuk mengerahkan atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁵

Dalam implementasinya, perencanaan dalam pendidikan dimulai dari melakukan analisis strategis kondisi sekolah/madrasah sampai rencana pembiayaan/pendanaan bahkan harus sampai kepada perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam mencapai visi lembaga.¹⁶ Visi madrasah merupakan tujuan jauh yang harus dicapai oleh madrasah dalam kurun waktu tertentu. Dengan ditetapkannya tujuan jauh tersebut, maka seluruh komponen lembaga akan diarahkan ke tujuan tersebut. Madrasah yang memiliki visi yang jelas maka dalam menggerakkan keseluruhan proses organisasinya senantiasa mengacu pada pada visi tersebut.¹⁷

Visi juga harus dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan stakeholder potensial dan kegiatan utama lembaga. Visi dirumuskan dalam kalimat yang mudah dipahami dan menunjukkan suatu keadaan madrasah dalam jangka panjang (berkisar 5-10 tahun). Keadaan tersebut dapat diwujudkan dalam ukuran yang kualitatif.¹⁸

Tujuan dan sasaran merupakan arah atau keadaan yang akan dupayakan untuk dicapai oleh madrasah dalam kurun waktu sedang dan pendek. Kurun waktu sedang berkisar antara 2 sampai 3 tahun dan kurun waktu pendek adalah kurun waktu paling lama satu tahun. Tujuan dan sasaran harus berinduk pada visi madrasah. Jika madrasah tersebut memiliki unit-unit atau bagian-bagian, maka tujuan dan sasaran dapat merupakan tujuan dan sasaran unit atau bagian-bagian tersebut.

Sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung. Yang paling sering dilakukan adalah dalam rapat dan sambutan-sambutan kegiatan, sehingga warga marasah dapat memahami visi tersebut.¹⁹ Pelaksanaan sosialisasi tersebut masih kurang. Padahal sosialisasi dapat dilakukan dalam berbagai kesempatan dan diutamakan kepada komponen penyenggara pendidikan (kepala, wakil, guru dan kepala unit layanan siswa lainnya).

2. Pelaksanaan program SPMP Berbasis Manajemen Mutu Terpadu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat.

Pelaksanaan program di MTsN Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan perencanaan yang telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis EDM dan akreditasi sebagai berikut:

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU MADRASAH
Muarpin, Firman Nugraha, Yudha Andana Prawira

a. Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum

Pelaksanaan pengembangan kurikulum di madrasah yang diteliti secara substantif semuanya berhubungan dengan Kurikulum dan pembelajaran yang diintegrasikan dengan dokumen Kurikulum. Dalam dokumen Kurikulum disebutkan tentang visi, misi, tujuan madrasah sampai dengan Kurikulum yang dilaksanakan di madrasah tersebut. Untuk itu sangat diperlukan pedoman pengelolaan madrasah secara lengkap sebagai panduan dalam kegiatan madrasah dengan pedoman yang disepakati oleh semua warga madrasah.

Dalam pelaksanaan program tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah dilaksanakan. Dalam Petunjuk teknis akreditasi disebutkan bahwa pedoman yang mengatur aspek pengelolaan terdiri dari: Kurikulum, Kalender pendidikan/akademik, Struktur organisasi madrasah, Pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, Peraturan akademik, Tata tertib madrasah, Kode etik madrasah, dan Biaya operasional madrasah.

Sebagai suatu sistem Kurikulum, dalam pedoman pengelolaan madrasah yang mengakomodasi berbagai perbedaan secara tanggap budaya dengan mensinergikan aneka ragam kepentingan dan kemauan daerah. Melalui pembelajaran berbasis kompetensi menerapkan strategi yang meningkatkan kebermaknaan pembelajaran untuk semua peserta didik terlepas dari latar budaya, etnik, agama dan gender.

b. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Pelaksanaan program kegiatan pembelajaran pengelolaannya juga selain berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang SPMP juga didasarkan kepada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007. Pemecahan masalah dalam mengimplementasikan pembelajaran sesuai dengan SPMP pendidikan, perlu disusun sebuah perencanaan yang strategik dengan pendekatan sistemik. Agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dan kekeliruan yang terulang-ulang. Konsep dasar perencanaan dalam pendidikan meliputi perubahan lingkungan pendidikan, kebutuhan organisasi pendidikan, sistem dan teori yang digunakan dalam menyusun sebuah perencanaan. Perencanaan yang sistemik memiliki manfaat yang sangat besar sekali bagi pengimplementasian pembelajaran sesuai dengan SPMP pendidikan dalam menyeimbangkan antara *supply* dan *demand*.

c. Pelaksanaan Kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pelaksanaan program pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana disebutkan di atas menurut regulasinya sudah dapat dilaksanakan secara optimal terutama dalam hal promosi, pengembangan, penempatan dan mutasi serta penugasan berdasarkan prinsip profesionalisme. Hal ini disebabkan karena pengelolaan SDM di madrasah sangat tergantung kepada kebijakan madrasah dan kanmenag. Pelaksanaan program dalam bidang pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kewajiban madrasah. Diawali dengan menyusun program, kemudian melaksanakan program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Madrasah sebagai organisasi mempunyai SDM yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Pada madrasah yang diteliti secara umum tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari SDM yang ada telah melaksanakan Tupoksi sesuai dengan regulasi, sehingga jika dibandingkan dengan aspek yang lain, maka aspek pendayagunaan SDM pada madrasah yang diteliti merupakan aspek yang dapat diimplementasikan secara penuh. Beberapa tenaga yang secara khusus belum terpenuhi atau masih rangkap dengan tugas lainnya adalah tenaga laboratorium masih dirangkap oleh guru IPA dan tenaga perpustakaan dirangkap tugas oleh guru atau tenaga administrasi. Sedangkan tenaga (teknisi) sumber belajar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran di semua madrasah yang diteliti belum ada yang ditugaskan sebagai teknisi sumber belajar, biasanya tugasnya dilaksanakan oleh tenaga kebersihan atau guru mata pelajaran.

d. Pelaksanaan kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler

Mutu Pendidikan di MTs Negeri Bandung Barat sebagai hasil dari implementasi SPMP adalah mutu pendidikannya semakin baik, karena dengan pengelolaan perencanaannya lebih terukur dan pelaksanaan

serta evaluasinya pun lebih operasional dan terukur. Peningkatan mutu pendidikan sebagai hasil implementasi SPMP, yaitu: 1) Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai standar proses, 2) Lulusan mendapat penerimaan yang baik dari masyarakat, 3) Kegiatan ekstrakurikuler terlaksana sesuai dengan minat dan bakat peserta didik, 4) Budaya keagamaan di lingkungan madrasah dilaksanakan, dan lain sebagainya.

Mutu lulusan MTs Negeri Bandung Barat sebagai hasil implementasi SPMP dinilai lebih baik, karena semua aspek direncanakan dengan lebih baik, kemudian dilaksanakannya dapat lebih baik serta pengawasannya pun lebih ketat kemudian kegiatan ekstrakurikuler lebih lengkap dan variatif. Sehingga lulusannya mempunyai daya saing di masyarakat.

Adapun perilaku peserta didik MTs Negeri Bandung Barat sebagai hasil implementasi SPMP juga dirasakan lebih baik karena program ekstrakurikuler yang ada berpengaruh terhadap kepribadian siswa. Beberapa peningkatan perilaku peserta didik sebagai hasil implementasi SPMP, yaitu perilaku siswa menjadi: 1) kegiatan keagamaan lebih aktif, 2) lebih menghargai perbedaan, 3) lebih banyak kerjasama, 4) memiliki sifat sopan santun, 5) lebih peduli dengan lingkungan madrasah, 6) lebih disiplin, dan 7) lebih tenggang rasa.

Sementara dalam budaya madrasah sebagai hasil implementasi SPMP berbasis manajemen mutu terpadu dirasakan cukup signifikan membentuk budaya mutu sesuai standar yang dipersyaratkan. Berikut beberapa peningkatan budaya madrasah, yaitu budaya kegiatan ibadah (shalat berjama'ah, tadarus Al-Qur'an, shalat dhuha bersama dan lain-lain), budaya kedisiplinan, menghormati guru dan lain-lain

e. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana

Dalam bidang sarana dan prasarana pelaksanaannya diawali dengan menetapkan kebijakan program madrasah secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana juga dikaitkan dengan standar sarana dan prasarana, sehingga program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada standar sarana dan prasarana, yaitu dalam hal: 1) merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan; 2) mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan; 3) melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di madrasah; 4) menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan Kurikulum masing-masing tingkat; 5) pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan. 6) Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. 7) Pengelolaan sarana prasarana madrasah harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu Standar Sarana dan Prasarana dan dituangkan dalam rencana pokok (*master plan*) yang meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangannya.

Pada umumnya implementasi program pengelolaan sarana dan prasarana di madrasah yang diteliti telah terlaksana, namun beberapa program yang kurang optimal adalah dikegiatan pemeliharaan dan evaluasi serta melengkapi fasilitas pembelajaran. Khusus di MTs Negeri 2 Bandung Barat sudah memiliki aula sebagai pertemuan atau rapat-rapat serta kegiatan berada di lantai dua dengan yang juga berfungsi sebagai ruang kelas dilengkapi dengan LCD dan layarnya.

Diantara sarana yang dapat mendukung pembelajaran adalah pengelolaan perpustakaan. Untuk pengelolaan perpustakaan madrasah diharuskan: 1) menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya; 2) merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik; 3) membuka pelayanan minimal enam jam sehari pada hari kerja; 4) melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal; 5) menyediakan pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari madrasah lain baik negeri maupun swasta.

Pengelolaan laboratrium sebagai salah satu sarana dan prasarana pendidikan seharusnya menurut ketentuan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 pengelolaan laboratorium dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan kerusakan. Di MTs Negeri Kab. Bandung Barat yang diteliti

pengelolaan laboratorium belum optimal, karena alat-alat laboratoriumnya tidak lengkap, hanya terdapat boneka peraga, alat-alat olah raga, dan yang lainnya yang merupakan peralatan kelengkapan kegiatan ekstrakurikuler.

f. Pengelolaan pembiayaan

Pelaksanaan program dalam bidang keuangan dan pembiayaan didahului dengan penyusunan pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional madrasah sebagaimana dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 mengatur tentang: 1) sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola; 2) penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional; 3) kewenangan dan tanggungjawab kepala madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya; 4) pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite madrasah, serta institusi di atasnya. 5) Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional madrasah diputuskan oleh komite madrasah dan ditetapkan oleh kepala madrasah serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya. 6) Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional madrasah disosialisasikan kepada seluruh warga madrasah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. 7) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana ketentuan telah diimplementasikan di madrasah di MTs Negeri Bandung Barat yang diteliti. Namun masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pengamatan di lapangan bahwa yang mengetahui persis tentang pengelolaan pembiayaan hanya kepala madrasah, bendahara dan operator.

g. Pelaksanaan kegiatan kemitraan dan peran serta masyarakat

Pelaksanaan program dalam peran serta masyarakat dan kemitraan madrasah dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 disebutkan bahwa pelaksanaan program tersebut harus memenuhi ketentuan yaitu: 1) melibatkan warga dan masyarakat pendukung madrasah dalam mengelola pendidikan. Warga madrasah dilibatkan dalam pengelolaan akademik. 2) Masyarakat pendukung madrasah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik. 3) Keterlibatan peranserta warga madrasah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan. 4) Setiap madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan. 5) Kemitraan madrasah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah. 6) Sistem kemitraan madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.

3. Pengawasan dan Evaluasi implementasi SPMP Berbasis Manajemen Mutu Terpadu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat

Pengawasan dan evaluasi dalam implementasi SPMP berbasis mutu terpadu dapat juga dilakukan dengan melaksanakan pengawasan dan evaluasi baik evaluasi internal melalui Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang seharusnya dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun dengan fokus kepada evaluasi proses pembelajaran dan 1 kali setahun untuk mengevaluasi program kerja tahunan dan evaluasi eksternal yaitu dengan akreditasi yang dilakukan setiap empat tahun sekali.

Kegiatan evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan oleh MTs Negeri kabupaten Bandung Barat yang diteliti bersamaan dengan kegiatan pembagian tugas baik pada awal semester ganjil maupun pada awal semester genap. Namun dalam kegiatan evaluasi ini fokus terhadap proses pembelajaran, sehingga kegiatannya menjadi efektif. Sedangkan kegiatan evaluasi terhadap program kerja tahunan selalu dilaksanakan, pelaksanaannya biasanya bersamaan dengan rapat awal tahun ajaran baru pada setiap tahunnya.

Semua hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut didokumentasikan untuk memperbaiki kinerja madrasah, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan. Implementasi pengawasan seperti ketentuan SPMP yang tersebut di atas di MTs yang

diteliti belum semuanya terlaksana. Dokumentasi terhadap program pengawasan baik pemantauan dan supervisi terdokumentasikan dengan baik, sehingga tindaklanjutnya juga dapat dirumuskan dengan baik. Peningkatan kualitas mutu pendidikan di madrasah signifikan karena salah satu sebabnya diimplementasikan pengawasan dan evaluasi di madrasah secara komprehensif.

4. Kendala dan solusi implementasi SPMP Berbasis Manajemen Mutu Terpadu dalam meningkatkan mutu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat

Adapun kendala dan solusi dalam implementasi SPMP Berbasis Manajemen Mutu Terpadu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat meliputi:

- a. Pemahaman *stakeholder* pada peraturan merupakan kendala yang dihadapi oleh madrasah dalam menyusun perencanaan program, sebab keterbatasan informasi dan komunikasi dengan dunia luar serta pembinaan yang kurang dari pihak berwenang (pengawas pendidikan). Bahan perencanaan yang tidak lengkap merupakan kendala yang dihadapi oleh madrasah dalam menyusun perencanaan program, sebab keterbatasan informasi dan komunikasi dengan dunia luar serta pembinaan yang kurang dari pihak berwenang (pengawas pendidikan). Selain itu kreatifitas pemangku kepentingan terutama kepala madrasah sangat kurang perhatian terhadap pengumpulan bahan-bahan sebagai bahan perencanaan kaitanya dengan regulasi dan data informasi.
- b. Pelaksanaan program kerja di madrasah yang diteliti yaitu MTs Negeri 1 Bandung Barat, MTs Negeri 2 Bandung Barat dan MTs Negeri 5 Bandung Barat, adalah:
 - 1) Kompetensi sumber daya manusia (SDM);
 - 2) Ketersediaan sarana prasarana belum lengkap;
 - 3) Dukungan masyarakat yang masih kurang;
 - 4) Ketersediaan dana (pembiayaan) yang bersumber hanya dari DIPA dan BOS saja;
 - 5) Dukungan pihak terkait (Komite, Kemenag, dan lain-lain).
- c. Pengawasan dan evaluasi program kerja madrasah di MTs Negeri 1 Bandung Barat, MTs Negeri 2 Bandung Barat dan MTs Negeri 5 Bandung Barat;
 - 1) SDM yang melaksanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi belum merata memahami kegiatan pengawasan dan evaluasi yang seharusnya.
 - 2) Keberatan dari berbagai pihak (pendidik dan tenaga pendidikan) untuk diawasi dan dievaluasi.
 - 3) Ketersediaan instrument pengawasan dan evaluasi
 - 4) Waktu kegiatan pengawasan dan evaluasi belum terjadwal
 - 5) Hasil pengawasan dan evaluasi jarang ditindaklanjuti dengan perbaikan
- d. Dokumentasi yang masih lemah merupakan kendala yang dihadapi oleh madrasah dalam menyusun perencanaan program, sebab tidak ada pengelola atau petugas yang khusus untuk mengelola data dan informasi. Memang sudah ada operator yang berhubungan data dan informasi, namun tugasnya sering disibukan dengan masalah keuangan mulai dari perencanaan, pengajuan sampai pelaporan keuangan. Dengan terkonsentrasikannya terhadap keuangan masalah data dan informasi lain yang penting untuk kegiatan penyusunan perencanaan menjadi kurang optimal dalam pengelolaannya.

Upaya dalam mengimplementasikan SPMP di MTs Kabupaten Bandung Barat dalam mengimplementasikan SPMP dan peningkatan mutu pada MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat melaksanakan SPMP dengan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi program serta melaksanakan kepemimpinan yang efektif. Dan dari pelaksanaan tersebut mutu pendidikan di madrasah masing-masing menjadi lebih baik. Bukti implementasi tersebut dari berhasilnya madrasah mendapatkan nilai akreditasi yang sangat baik dan baik.

5. Tingkat Keberhasilan SPMP Berbasis Manajemen Mutu Terpadu dalam meningkatkan mutu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat

Temuan pertama, tentang perencanaan program yang dilaksanakan di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat telah sesuai dengan regulasi secara umum, perencanaan program dalam implementasi SPMP diantaranya menentukan visi, misi dan tujuan madrasah.

Visi dari masing-masing MTs Negeri Bandung Barat yang diteliti adalah:

- a. Visi MTs Negeri 1 Bandung Barat Cihampelas: “Terwujudnya Peserta didik yang berprestasi, ber-Akhlak mulia, ber-Taqwa, ber-Amaliah nyata, serta Sehat jasamani dan rohani”. atau di singkat “PATAS”.
- b. Visi MTs Negeri 2 Bandung Barat: “Unggul dalam Prestasi, Tangguh dalam Kompetisi, dan Santun dalam Prilaku”.
- c. Visi MTs Negeri 5 Bandung Barat: “Terbentuknya manusia yang beriman, berilmu dan beramal serta berakhlak mulia”

Visi yang ditentukan madrasah sesuai dengan tuntutan *stakeholder* dan masyarakat, maka penyegaran/pengembangan visi dengan melaksanakan evaluasi pencapaian visi serta menyesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai tuntutan regulasi. Perencanaan program merupakan yang paling strategis yang menentukan apakah madrasah akan menjadi madrasah bermutu atau tidak. Sebagaimana pendapat Mulyasa mengungkapkan tentang perencanaan dalam perspektif program pendidikan sedikitnya memiliki dua fungsi utama, yaitu: 1) sebagai upaya sistematis untuk menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia atau dapat disediakan. 2) sebagai kegiatan untuk mengerahkan atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan(Mulyasa, 2007).

Dalam implementasinya, perencanaan dalam pendidikan dimulai dari melakukan analisis strategis kondisi sekolah/madrasah sampai rencana pembiayaan/pendanaan bahkan harus sampai kepada perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam mencapai visi lembaga(Muhaimin, 2011).

Visi madrasah merupakan tujuan jauh yang harus dicapai oleh madrasah dalam kurun waktu tertentu. Dengan ditetapkannya tujuan jauh tersebut, maka seluruh komponen lembaga akan diarahkan ke tujuan tersebut. Madrasah yang memiliki visi yang jelas maka dalam menggerakkan keseluruhan proses organisasinya senantiasa mengacu pada pada visi tersebut. Sebaliknya madrasah yang tidak memiliki visi yang jelas maka dalam menggerakkan organisasinya tidak mempunyai arah karena setiap komponen menentukan arahnya sendiri-sendiri, madrasah tersebut tidak akaa ada perkembangan yang berarti.

Visi juga harus dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan stakeholder potensial dan kegiatan utama lembaga. Visi dirumuskan dalam kalimat yang mudah dipahami dan menunjukan suatu keadaan madrasah dalam jangka panjang (berkisar 5-10 tahun). Keadaan tersebut dapat diwujudkan dalam ukuran yang kualitatif (Muhaimin, 2011).

Dengan demikian antara visi, misi, tujuan, sasaran, program dan hal-hal lainnya dalam perencanaan program sebaiknya sesuai dan berkaiatan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu visi, misi dan tujuan madrasah menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perencanaan program yang akan dilaksanakan di suatu madrasah.

Tabel Perbandingan Implementasi Manajemen Mutu di Madrasah

Aspek Yang Diteliti	MTs Negeri 2 Bandung Barat	MTs Negeri 1 Bandung Barat	MTs Negeri 5 Bandung Barat
Perencanaan imlementasi SPMP	Menyusun visi, misi dan tujuan sesuai standar	Menyusun visi, misi dan tujuan sesuai standar	Menyusun visi, misi dan tujuan sesuai standar

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU MADRASAH
Muarpin, Firman Nugraha, Yudha Andana Prawira

dalam menyusun visi, misi dan tujuan	dan tuntutan masyarakat berkonsultasi dengan KKM dan pengawas	dan tuntutan masyarakat berkonsultasi dengan KKM dan pengawas	dan tuntutan masyarakat berkonsultasi dengan KKM dan pengawas
Pelaksanaan visi, misi dan tujuan dalam Implementasi SPMP	1. Pelaksanaan program sesuai rencana 2. Pengelolaan pembiayaan sesuai dengan DIPA 3. Koordinasi dengan pengawas, komite dan kemenag 4. Menjalinkan Kemitraan dengan MAN, SMAN, SMK, masyarakat dan ponpes.	1. Pelaksanaan program sesuai rencana 2. Pengelolaan pembiayaan sesuai dengan DIPA 3. Koordinasi dengan pengawas, komite dan kemenag	1. Pelaksanaan program sesuai rencana 2. Pengelolaan pembiayaan sesuai dengan DIPA 3. Koordinasi dengan pengawas, komite dan kemenag
Pengawasan dan Evaluasi dalam Implementasi SPMP	Terintegrasi antara pengawas, komite, pondok pesantren, dan masyarakat	Terintegrasi antara pengawas, komite, dan masyarakat	Terintegrasi antara pengawas, komite, dan semua warga madrasah dalam memberikan masukan, terutama masyarakat sekitar.
Hasil Implementasi SPMP	Lulusan yang melanjutkan ke MAN/SMA/SMK dan pondok pesantren	Lulusan yang melanjutkan ke MAN/SMA/SMK dan pondok pesantren	Lulusan yang melanjutkan ke MAN/SMA/SMK dan pondok pesantren
Kendala dalam Implementasi SPMP	Berhubungan dengan SDM di madrasah, sarana prasarana dan pembiayaan	Berhubungan dengan SDM di madrasah, sarana prasarana dan pembiayaan	Berhubungan dengan SDM di madrasah, sarana prasarana dan pembiayaan
Upaya dalam mengatasi kendala implementasi SPMP	Peran aktif pengawas, komite, KKM, warga madrasah, dan masyarakat serta koordinasi dengan Kanmenag	Peran aktif pengawas, komite, KKM, warga madrasah, dan masyarakat serta koordinasi dengan pihak terkait (Kemenag dan KKM)	Peran aktif pengawas, komite, KKM, warga madrasah, dan masyarakat serta koordinasi dengan Kanmenag

Sumber: Hasil Penelitian

Mutu madrasah melalui implementasi SPMP berbasis manajemen mutu terpadu dalam perspektif internal dari madrasah yang diteliti telah mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa setiap tahunnya lulusan dari MTs Negeri 2 Bandung Barat yang melanjutkan ke jenjang MA/SMA/SMK negeri terus mengalami peningkatan dan ada juga yang mengelola pesantren. Di MTs Negeri 1 Bandung Barat, MTs Negeri 2 Bandung Barat dan MTs Negeri 5 Bandung Barat visi dan misinya diorientasikan kepada lulusan yang melanjutkan ke MA/SMA/SMK.

Sehingga ketiga madrasah secara internal telah meningkat mutu pendidikannya. Karena lulusan di madrasah tersebut sudah sesuai dengan standar internal MTs masing-masing. Dengan demikian lulusan bermutu relatif tergantung dari standar/ukuran yang digunakannya. Ketika suatu MTs menentukan dalam visinya adalah lulusan yang bermutu itu adalah yang berakhlak baik, maka ketika lulusan tersebut di masyarakat dapat berperilaku baik, maka lulusan tersebut dapat dikatakan lulusan bermutu dalam perspektif internal MTs tersebut.

Temuan kedua, tentang hasil peningkatan mutu melalui implementasi yang secara umum menunjukkan bahwa hasil implementasi SPMP berbasis mutu terpadu pada MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat adalah dapat peningkatan mutu madrasah, karena madrasah yang diteliti di kabupaten Bandung Barat telah mengelola lembaga pendidikan dengan berdasarkan pada visi, misi dan tujuan yang telah dibuat. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara dan observasi serta pembahasannya sebagaimana dideskripsikan di bawah ini meliputi mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu pendidikan, mutu lulusan, perilaku guru dan siswa serta budaya madrasah, khususnya dengan para

pengelola madrasah baik, kepala madrasah, para guru, TU, para peserta didik, komite dan melalui bimbingan para pengawas pembina.

- a. Mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebagai hasil implementasi SPMP dalam peningkatan mutu madrasah pada MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat meningkat kompetensi dan kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Peningkatan tersebut di antaranya juga disebabkan oleh tuntutan pendidik harus tersertifikasi dan tuntutan penciptaan proses pembelajaran yang berkualitas. Dengan tersertifikasinya pendidik, maka dengan sendirinya mutu pendidikan ada peningkatan walaupun belum terlalu signifikan. Sedangkan untuk tenaga kependidikan mutunya dapat meningkat karena tuntutan administrasi dan keuangan saat ini transparan dan harus akuntabel.
- b. Mutu pendidikan sebagai hasil implementasi SPMP dalam peningkatan mutu madrasah pada MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat juga meningkat, terutama dalam pengelolaan pembelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya di madrasah lebih terencana, bervariasi dan dapat membentuk kepribadian siswa lebih komprehensif. Mutu pendidikan yang disebabkan karena madrasah dapat mengimplementasikan SPMP secara konsekwen dan konsisten. Mutu pendidikan dapat dilihat dari mutu pembelajaran dan mutu lulusan sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan lain.
- c. Mutu lulusan sebagai hasil implementasi SPMP dalam peningkatan mutu madrasah pada MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat (pada lokus yang diteliti) adalah setiap tahun siswa lulus 100%. Khusus untuk lulusan MTs Negeri 2 Bandung Barat banyaknya lulusan yang melanjutkan ke MAN/SMAN/SMKN dan kepesantrenan. Serta dapat berkontribusi terhadap kegiatan keagamaan di masyarakat, lulusan MTs Negeri 1 Bandung Barat Cihampelas hanya 30-60% yang melanjutkan ke ke MAN/SMAN/SMKN, sedangkan lulusan MTs Negeri 5 Bandung Barat hanya 15-40% setiap tahun yang melanjutkan ke MAN/SMAN/SMKN. Tentu saja mutu lulusan dapat dilihat dari berbagai hal dan sebabnya. Seperti di MTs Negeri 5 Bandung Barat sebenarnya tidak melanjutkan pendidikan ke MAN/SMAN/SMKN dikarenakan karena keadaan ekonomi para keluarga siswa termasuk kategori rendah, sehingga tidak sedikit siswa sambil bersekolah juga sambil bekerja.
- d. Perilaku siswa dan guru sebagai hasil implementasi SPMP dalam peningkatan mutu madrasah pada MTs Negeri 2 Bandung Barat, MTs Negeri 1 Bandung Barat dan MTs Negeri 5 Bandung Barat di Kabupaten Bandung secara umum sudah ada peningkatan perilaku ke arah yang lebih baik. Hal ditunjukkan dalam pergaulan di madrasah dan laporan dari orang tuanya. Laporan yang dimaksud adalah komunikasi orang tua dengan pihak madrasah dalam kegiatan rapat atau keseharian dalam kegiatan pengajaran, dan lain-lain.
- e. Perilaku guru dari hasil implementasi SPMP lebih profesional, karena dengan SPMP guru dituntut untuk profesional. Profesionalisme guru sebagaimana diungkapkan oleh beberapa ahli, bahwa tuntutan hari ini guru harus profesional. Istilah profesionalisme menjadi penting dalam pendidikan, terutama untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Karena profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dapat berimplikasi terhadap mutu pendidikan dan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Dengan adanya program sertifikasi, secara formal pemerintah mengarahkan terciptanya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional secara berkesinambungan dan sistemik. Demikian juga para pengelola madrasah baik, kepala madrasah, para guru, TU, para peserta didik, komite dan melalui bimbingan para pengawas pembina

Uraian di atas menjelaskan strategi implementasi SPMP pendidikan dengan 5 (lima) komponen, yaitu perencanaan, program, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi program. Dari hal tersebut terfokus kepada tiga hal yang paling inti yang merupakan proses implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, hasil serta kendalanya.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasil implementasi SPMP berbasis Manajemen Mutu Terpadu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat mampu meningkatkan mutu pendidikan di madrasah dengan baik dan berkualitas terutama dalam perilaku peserta didik, budaya keagamaan madrasah yang menonjol, kegiatan pembelajaran, sarana dan prasarana yang memadai serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kreatif, inovatif dan berkualitas. Hal ini terlihat dari:

- a. Perencanaan program implementasi SPMP berbasis Manajemen Mutu Terpadu di MTs Negeri di Kabupaten Bandung Barat dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan regulasi dan penyusunan RKM terutama dalam menentukan visi, misi dan tujuan madrasah, rencana program prioritas, perencanaan pengawasan dan perencanaan evaluasi pencapaian program.
- b. Pelaksanaan program implementasi SPMP berbasis Manajemen Mutu Terpadu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas terutama dalam pengorganisasian SDM, pengelolaan pembiayaan dan sarana madrasah dapat lebih optimal sesuai perencanaannya.
- c. Pengawasan dan evaluasi program implementasi SPMP berbasis Manajemen Mutu Terpadu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas terutama yang dilakukan oleh kepala madrasah dengan melaksanakan supervisi, rapat evaluasi sekaligus tindak lanjut hasil supervisi dan evaluasi tersebut.
- d. Kendala dan solusi dalam implementasi SPMP berbasis Manajemen Mutu Terpadu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat dapat diidentifikasi kendala terutama belum terlaksananya EDM, pencapaian visi misi secara keseluruhan karena keterbatasan biaya, sarana dan prasarana serta dukungan *stake holder* yang belum maksimal. Sedangkan solusi mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan SPMP di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat dapat dihadapi dengan berbagai kegiatan, baik secara internal/mandiri yang dilaksanakan oleh madrasah tersebut dengan melakukan kegiatan pelatihan secara mandiri seperti *In House Training* (IHT), mengaktifkan MGMP, KKM, workshop, diikuti dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga diklat seperti Balai Diklat Keagamaan Bandung, Pusdiklat, LPMP, P4TK dan lain-lain.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan:

- a. Kepada pihak Kementerian Agama baik tingkat kabupaten Bandung Barat dan Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat, sebaiknya: Meningkatkan pembinaan, sosialisasi regulasi dan peningkatan kompetensi kepada warga madrasah untuk meningkatkan mutu madrasah dan menciptakan budaya mutu berkelanjutan; Menyediakan pedoman/panduan dalam mengimplementasikan SPMP dengan baik dalam meningkatkan mutu madrasah; dan Memberikan bantuan penyediaan sarana dan prasarana serta bantuan pembiayaan kegiatan untuk peningkatan mutu madrasah.
- b. Kepada Pengawas Pembina khususnya, sebaiknya: Melakukan pendampingan dalam implementasi SPMP dengan baik untuk meningkatkan mutu madrasah dan budaya mutu secara berkelanjutan, dan Melakukan pembinaan, pengawasan dan supervisi secara berkelanjutan dan melakukan tindak lanjut hasil dari pengawasan dan supervisi tersebut.
- c. Kepada pihak madrasah (kepala madrasah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya) sebaiknya: Memahami penyusunan RKM dan RKT didasarkan atas hasil ED; Memaksimalkan SDM yang ada, mengadakan berbagai pelatihan/kegiatan yang dapat meningkatkan SDM, pengelolaan biaya dan sarana di madrasah secara efektif. Menyusun panduan mekanisme kegiatan pengawasan dan

evaluasi secara internal, sehingga mutu madrasah dapat dipantau secara internal dapat dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Menyusun panduan mekanisme kegiatan madrasah dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, melibatkan semua warga madrasah, membudayakan mutu dan peningkatan mutu madrasah secara berkelanjutan, serta Meningkatkan kompetensi dan kinerjanya sesuai dengan tuntutan, peran dan fungsinya agar mampu melaksanakan SPMP dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu secara berkelanjutan.

- d. Kepada orang tua peserta didik dan peserta didik untuk dapat memberikan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu di madrasah. Sehingga dengan banyaknya masukan, madrasah dapat menyesuaikan tuntutan tersebut dan memenuhi mutu yang diinginkan warga madrasah tersebut.
- e. Kepada dinas pendidikan Kabupaten Bandung Barat dan dinas Prov. Jawa Barat memberikan bantuan penyediaan sarana dan prasarana serta bantuan pembiayaan kegiatan untuk peningkatan mutu madrasah.
- f. Kepada Balai Diklat Keagamaan Bandung senantiasa melakukan peningkatan kompetensi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui diklat-diklat peningkatan kompetensi, diklat berjenjang, diklat pembentukan jabatan melalui diklat reguler, Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) dan Diklat Di Luar Kampus.(DDLK) yang dampaknya akan meningkatkan kualitas SDM di madrasah semakin baik.

END NOTES

- ¹ UU_No.20/2003 (2003) 'Undang-undang Sistem Pendidikan', 71, pp. 6–6.
- ² Nurudin (2007) *Ujian Nasional di Madrasah Persepsi dan Aspirasi Masyarakat*. Jakarta: Gaung Persada Press.; Prawira, Y. A. (2021) 'Menanti Kinerja Kepala Madrasah Sebagai Hasil Pelatihan Partisipatif', *Fastabiq : Jurnal Studi Islam*, 2(1), pp. 1–13. doi: 10.47281/fas.v2i1.23.
- ³ The_Jakarta_Post (2001) 'Indonesia's Worst Education System in Asia'. Jakarta: The Jakarta Post, p. 2001.
- ⁴ Prawira, Y. A. and Nugraha, F. (2021) 'Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah Melalui Pelatihan Partisipatif Secara Daring Berbasis Heuristik', *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), p. 307. doi: 10.37905/aksara.7.2.307-316.2021.
- ⁵ Hadis, A. dan Nurhayati. (2020). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- ⁶ Helmansyah, H., Prawira, Y. A. and Nugraha, F. (2021) 'Menimbang Pelatihan Daring : Respon Dan Harapan', 14(1), pp. 161–179.
- ⁷ Helmansyah, H., Prawira, Y. A. and Nugraha, F. (2021) 'Menimbang Pelatihan Daring : Respon Dan Harapan', 14(1), pp. 161–179.; Depag (2001) 'Program Inservice Training KKG MGMP KK BP3', in. Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, p. 2001.
- ⁸ Darajat, Z. (1999) 'Pengantar dalam Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya Jakarta - Logos Wacana Ilmu 1999', in. Jakarta: Logos, p. 1999.
- ⁹ Dhofir, Z. (1994) 'Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai', in. Jakarta: LP3ES, p. 1994.
- ¹⁰ Fajar, Malik. (1998). *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung : Mizan.
- ¹¹ Asrohah, H. (1999) 'Sejarah Pendidikan Islam', in. Jakarta: Logos, p. 1992.
- ¹² Rahardjo, M. (2020) *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora (Dari Teori ke Praktik)*. Malang: Republik Media.
- ¹³ Kurnia, T. and Prawira, Y. A. (2020) 'Pemenuhan Aspek Afektif Siswa Sekolah Dasar dalam Pembelajaran Jarak Jauh Melalui Komitmen Belajar pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 5(2), pp. 40–41.; Sugiyono (2014) 'prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif. intro (PDFDrive).pdf'.
- ¹⁴ Prawira, Y. A., Ayundari, V. L. and Kurnia, T. (2021) 'Exploring Students' Affective on Using Asynchronous Learning During the Pandemic Period', *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), pp. 33–50. doi: 10.15575/jpi.v7i1.9740.
- ¹⁵ Mulyasa, E. (2007) *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- ¹⁶ Muhaimin (2011) *Manajemen Pendidikan; Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- ¹⁷ Muhaimin (2011) *Manajemen Pendidikan; Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- ¹⁸ Muhaimin (2011) *Manajemen Pendidikan; Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- ¹⁹ Peneliti and Narasumber (2016) 'Wawancara dengan Komite Madrasah Sumber Peneliti 2016'. Bandung: sumber wawancara.

REFERENSI

- Anonim (2019) 'Penjaminan Mutu Tindakan Sistematis'. Bandung: UPI Edu. Available at: fpmipa.upi.edu.
- ASROHAH, H. (1999) 'Sejarah Pendidikan Islam', in. Jakarta: Logos, p. 1992.
- Darajat, Z. (1999) 'Pengantar dalam Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya Jakarta - Logos Wacana Ilmu 1999', in. Jakarta: Logos, p. 1999.
- Depag (2001) 'Program Inservice Training KKG MGMP KK BP3', in. Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, p. 2001.
- Dhofir, Z. (1994) 'Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai', in. Jakarta: LP3ES, p. 1994.
- Fajar, Malik. (1998). *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung : Mizan.
- Hadis, A. dan Nurhayati. (2020). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Helmansyah, H., Prawira, Y. A. and Nugraha, F. (2021) 'Menimbang Pelatihan Daring : Respon Dan Harapan', 14(1), pp. 161–179.
- Kurnia, T. and Prawira, Y. A. (2020) 'Pemenuhan Aspek Afektif Siswa Sekolah Dasar dalam Pembelajaran Jarak Jauh Melalui Komitmen Belajar pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 5(2), pp. 40–41.
- Muhaimin (2011) *Manajemen Pendidikan; Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyasa, E. (2007) *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurudin (2007) *Ujian Nasional di Madrasah Persepsi dan Aspirasi Masyarakat*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Peneliti and Narasumber (2016) 'Wawancara dengan Komite Madrasah Sumber Peneliti 2016'. Bandung: sumber wawancara.
- Prawira, Y. A. (2021) 'Menanti Kinerja Kepala Madrasah Sebagai Hasil Pelatihan Partisipatif', *Fastabiq : Jurnal Studi Islam*, 2(1), pp. 1–13. doi: 10.47281/fas.v2i1.23.
- Prawira, Y. A., Ayundari, V. L. and Kurnia, T. (2021) 'Exploring Students' Affective on Using Asynchronous Learning During the Pandemic Period', *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), pp. 33–50. doi: 10.15575/jpi.v7i1.9740.
- Prawira, Y. A. and Nugraha, F. (2021) 'Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah Melalui Pelatihan Partisipatif Secara Daring Berbasis Heuristik', *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), p. 307. doi: 10.37905/aksara.7.2.307-316.2021.
- Rahardjo, M. (2020) *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora (Dari Teori ke Praktik)*. Malang: Republik Media.
- Sugiyono (2014) 'prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif. intro (PDFDrive).pdf'.
- The_Jakarta_Post (2001) 'Indonesias Worst Education System in Asia'. Jakarta: The Jakarta Post, p. 2001.
- UU_No.20/2003 (2003) 'Undang-undang Sistem Pendidikan', 71, pp. 6–6.